

# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN

Laporan Hasil Monitoring dan Tindak Lanjut Evaluasi
AKIP SKPD Pemerintah Kabupaten Balangan
Tahun 2023

Nomor

: 700/249/LHM/INSPEKTORAT-BLG/2024

Tanggal

: 13 DESEMBER 2024



## PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN INSPEKTORAT

Jln. Jenderal A. Yani Km. 3,5 Kel. Batu Piring Telp. (0526) 2028395, Fax. (0526) 2028248 Paringin Selatan, Kode Pos 71662

Paringin, 13 Desember 2024

Nomor: 700/249/LHM/Inspektorat-Blg/2024

Sifat : Rahasia

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Hasil Monitoring dan Tindak Lanjut

Evaluasi AKIP SKPD Pemerintah Kabupaten

Balangan Tahun 2023

Kepada Yth: Bupati Balangan

Di

Paringin

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan Surat Perintah Inspektur Nomor : 090/84/SPT-PKPTMONEV/INSPEKTORAT-BLG/2024 tanggal 1 Oktober 2024, kami telah melakukan Monitoring dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP SKPD Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Laporan Hasil Monitoring dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP SKPD disajikan sebagai berikut:

### A. Dasar Hukum Monitoring dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP

 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### B. Latar Belakang Monitoring dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP

Pengawasan sebagai suatu proses rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah wajib ditindaklanjuti oleh instansi Pemerintah Daerah secara konsisten dan bertanggung jawab.

Untuk mengetahui sejauh mana tindak lanjut hasil Evaluasi AKIP dilaksanakan dan untuk peningkatan perbaikan evaluasi AKIP tahun berikutnya diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

#### C. Tujuan Monitoring dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP

Secara umum tujuan Monitoring dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana rekomendasi hasil Laporan Evaluasi SAKIP ditindaklanjuti oleh SKPD, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP dan untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### D. Ruang Lingkup Monitoring dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP

Monitoring dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP ini dilaksanakan sesuai rekomendasi yang diberikan pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP yang disampaikan ke masing-masing SKPD.

#### E. Metodologi Monitoring dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP

Metodologi yang dapat digunakan dalam Monitoring dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP adalah pengisian pada link spreadsheet berikut <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cwzcip1WlpNED-PKQ6K7\_S-TZN9PIHNwY-RhWnutEXw/edit#gid=1874951484">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cwzcip1WlpNED-PKQ6K7\_S-TZN9PIHNwY-RhWnutEXw/edit#gid=1874951484</a>.

Didalam spreadsheet tersebut setiap SKPD diminta untuk melakukan input rencana aksi/tindak lanjut, target waktu pelaksanaan tindak lanjut, progres pelaksanaan, kendala pelaksanaan tindak lanjut, dan mengisi link data dukung.

#### G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Pada tahun 2023 dilaksanakan evaluasi AKIP pada 30 SKPD di Kabupaten Balangan, hasil evaluasi AKIP tersebut sebanyak 2 SKPD memperoleh nilai A dan 28 SKPD memperoleh nilai BB.

#### H. Hasil Monitoring dan Tindak Lanjut LHE AKIP 2023

Pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut dilaksanakan dari tanggal 3 s.d 16 Oktober 2024. Data terakhir yang Tim ambil dengan batas waktu pengisian link tindak lanjut pada tanggal 28 Oktober 2024.

Jumlah penyelesaian tindak lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2023 adalah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti yang disertai dengan bukti dukung yang telah sesuai dan lengkap (bukan masih proses/belum lengkap dan tindak lanjut yang hanya bisa dilakukan ditahun 2025). Hasil dari monitoring dan tindak lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2023 dari 30 SKPD Pemerintah Kabupaten Balangan disajikan pada **lampiran 1**.

#### I. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Terhadap permasalahan yang ditemukan dalam monitoring dan tindak lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2023 dari 30 SKPD Pemerintah Kabupaten Balangan, kami rekomendasikan sebagai berikut:

- Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 dari Inspektorat.
- Melengkapi bukti dukung tindak lanjut yang masih belum lengkap/dalam proses.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Monitoring dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP SKPD Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023, Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menindaklanjuti hasil evaluasi SKPD tahun 2023.

Demikian yang dapat Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN,

Pembina Utama Muda NIP. 19730501 199311 1 001

#### Tembusan:

- 1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
- 2. Arsip.

## Rekap Nilai LHE AKIP SKPD TAHUN 2023 DAN TINDAK LANJUT HASIL MONITORING

No.	Nama SKPD (Sesuai Dokumen LKjIP Tahun 2023)	Nilai Akuntabilitas Kinerja		Rekomendasi			
		Tahun 2023	Predikat	Jumlah Rekomendasi		Rekomendasi yang belum Ditindak lanjuti	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	75,15	BB	6	0	6	Seluruh rekomendasi telah disusun rencana tindak lanjut, terdapat 4 rekomendasi yang belum dapat ditindaklanjuti karena berkaitan dengan penyusunan laporan kinerja SKPD tahun 2024, dan 2 rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dilengkapi dengan data dukung namun data dukung tersebut belum sesuai dengan rekomendasi dalam LHE AKIP
2	Dinas Kesehatan dan PPKB	79,50	BB	3	1	2	Seluruh rekomendasi telah disusun rencana tindak lanjut disertai target waktu pelaksanaan tindak lanjut, terdapat 2 rekomendasi yang belum dapat ditindaklanjuti karena menunggu masa penguploadan dokumen AKIP pada website Kementrian PANRB dan penyusunan laporan kinerja SKPD
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	80,70	A	3	3	0	Seluruh rekomendasi telah disusun rencana tindak lanjut disertai target waktu pelaksanaan tindak lanjut serta telah ditindaklanjuti dan dilengkapi dengan data dukung serta sesuai dengan rekomendasi dalam LHE AKIP
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	74,55	88	8	0	8	Seluruh rekomendasi telah disusun rencana tindak lanjut, target waktu pelaksanaan tindak lanjut, terdapat 4 rekomendasi yang belum dapat ditindaklanjuti karena menunggu masa penguploadan dokumen AKIP pada website Kementrian PANRB dan penyusunan laporan kinerja SKPD, dan 4 rekomendasi masih belum dilengkapi dengan data dukung yang sesuai / masih dalam proses.
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	75,00	ВВ	5	0	5	Seluruh rekomendasi telah disusun rencana tindak lanjut dan waktu pelaksanaan tindak lanjut triwulan IV, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dilengkapi dengan data dukung dan telah sesuai dengan rekomendasi dalam
6	Inspektorat	80,45	A	2	2	0	Seluruh rekomendasi telah disusun rencana tindak lanjut, 2 rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan dilengkapi dengan data dukung
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	77,85	BB	5	1	4	Sebagian rekomendasi telah disusun rencana tindak lanjut dan waktu pelaksanaan tindak lanjut, terdapat 2 rekomendasi yang belum dapat ditindaklanjuti karena berkaitan dengan penyusunan laporan kinerja SKPD tahun 2024, dan 1 rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dilengkapi dengan data dukung dan telah sesuai dengan rekomendasi dalam LHE AKIP dan 2 rekomendasi masi dalam proses tindak lanjut

8	Kecamatan Tebing Tinggi	72,45	BB	8	5	3	Seluruh rekomendasi telah disusun rencana tindak lanjut, terdapat 3 rekomendasi yang belum dapat ditindaklanjuti karena berkaitan dengan penyusunan laporan kinerja SKPD tahun 2024, dan 5 rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dilengkapi dengan data dukung dan telah sesuai dengan rekomendasi dalam LHE AKIP
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	72,35	BB	7	0	7	Seluruh rekomendasi masih belum disusun baik rencana tindak lanjut, target waktu pelaksanaan tindak lanjut dan data dukungnya
10	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	76,70	ВВ	4	4	0	Seluruh rekomendasi telah disusun rencana tindak lanjut, 4 rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan dilengkapi dengan data dukung
11	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	72,75	BB	12	0	12	Seluruh rekomendasi telah disusun rencana tindak lanjut, 1 rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti tetapi data dukung yang dilampirkan belum sesuai, 7 rekomendasi belum dapat dilaksanakan karena rencana tindak lanjut akan dimuat dalam dokumen LKjIP tahun 2024, dan 4 rekomendasi masih dalam nroses. Seluruh rekomendasi telah disusun rencana tindak lanjut, tindak lanjut atas temuan belum dapat dilaksanakan karena rencana tindak lanjut akan dimuat dalam dokumen LKjIP tahun 2024 yang baru bisa disusun pada awal tahun 2025. Untuk sementara, SKPD terkait melampirkan Surat Pernyataan Komitmen Pimpinan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut pada penyusunan LKjIP tahun 2025
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79,10	BB	2	0	2	
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	78,30	ВВ	4	0	4	Seluruh rekomendasi sudah memuat rencana tindak lanjut, waktu pelaksanaan tindak lanjut triwulan IV, namun untuk semua rekomendasi hanya bisa ditindaklanjuti pada saat penyusunan SAKIP Tahun 2024 yaitu pada awal tahun 2025, selain itu SKPD ada melampirkan Surat Pernyataan Komitmen Pimpinan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut pada penyusunan LKjIP tahun 2025
14	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	73,05	BB	9	4	5	Seluruh rekomendasi sudah memuat rencana tindak lanjut, waktu pelaksanaan tindak lanjut triwulan IV, dan 4 rekomendasi sudah disertai data dukung, untuk 5 rekomendasi lainnya hanya bisa ditindaklanjuti pada saat penyusunan SAKIP Tahun 2024
15	Kecamatan Awayan	71,40	BB	9	3	6	Rencana tindak lanjut atas temuan sudah disusun, 3 rekomendasi tela ditindaklanjuti dan dilengkapi data dukung, 1 rekomendasi masih belum selesai dan 5 rekomendasi belum dapat dilaksanakan karena rencana tindak lanjut akan dimuat dalam dokumen LKjIP tahun 2024 yang baru bisa disusun pada awal tahun 2025.

16 Kecamatan Paringin Selatan	76,40	BB	7	1	6	Seluruh rekomendasi sudah memuat rencana tindak lanjut, tetapi untuk target waktu pelaksanaan tindak lanjut belum diisi, 1 rekomendasi pada perencanaan kinerja sudah ditindaklanjuti dan disertai data dukung, 6 rekomendasi pada pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja masih belum bisa dilaksanakan karena rencana tindak lanjut ini akan dimuat dalam dokumen LKjIP tahun 2024 yang baru bisa disusun pada awal tahun 2025
17 Kecamatan Juai	75,15	BB	7	1	6	Seluruh rekomendasi sudah memuat rencana tindak lanjut, tetapi untuk target waktu pelaksanaan tindak lanjut belum diisi, 1 rekomendasi pada perencanaan kinerja sudah ditindaklanjuti dan disertai data dukung, 5 rekomendasi pada pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja masih belum bisa dilaksanakan karena rencana tindak lanjut ini akan dimuat dalam dokumen LKjIP tahun 2024 yang baru bisa disusun pada awal tahun 2025, dan 1 rekomendasi pada evaluasi akuntabilitas kinerja masih dalam proses
18 Kecamatan Paringin	72,75	BB	11	1	10	Seluruh rekomendasi sudah disusun rencana tindak lanjut, target waktu pelaksanaan tindak lanjut juga sudah diisi, untuk 1 rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dilengkapi data dukung, 5 rekomendasi masih belum selesai/dalam proses dan 5 rekomendasi belum dapat dilaksanakan karena rencana tindak lanjut akan dimuat dalam dokumen LKjiP tahun 2024 yang baru bisa disusun pada awal tahun 2025.
19 Kecamatan Halong	75,90	ВВ	5	1	4	Seluruh rekomendasi sudah memuat rencana tindak lanjut, waktu pelaksanaan tindak lanjut, 1 rekomendasi sudah ditindak lanjuti disertai dengan data dukung, 1 rekomendasi masih dalam proses atau masih ada yang belum selesai, dan 3 rekomendasi masih belum bisa ditindaklanjuti karena hanya bisa ditindaklanjuti pada penyusunan LKjIP tahun 2024
20 Kecamatan Batumandi	75,90	BB	4	1	3	Seluruh rekomendasi sudah memuat rencana tindak lanjut, waktu pelaksanaan tindak lanjut, 1 rekomendasi sudah ditindak lanjuti disertai dengan data dukung, 1 rekomendasi masih dalam proses, dan 2 rekomendasi masih belum bisa ditindaklanjuti karena hanya bisa ditindaklanjuti pada penyusunan LKjIP tahun 2024
21 Kecamatan Lampihong	74,55	BB	13	2	11	Seluruh rekomendasi sudah memuat rencana tindak lanjut, waktu pelaksanaan tindak lanjut sebagian sudah diisi, 2 rekomenda sudah ditindak lanjuti disertai dengan data dukung, 5 rekomenda pada perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja masih dalam proses, dan 5 rekomendasi masih belum bisa ditindaklanjuti karena hanya bisa ditindaklanjuti pada penyusunan LKjIP tahun 2024, dar 1 rekomendasi pada evaluasi akuntabilitas kinerja masih belum selesai ditindaklanjuti

	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	75,45	BB	6	2	4	Seluruh rekomendasi telah disusun rencana tindak lanjut, terdapat 3 rekomendasi yang belum dapat ditindaklanjuti karena berkaitan dengan penyusunan laporan kinerja SKPD tahun 2024, 1 rekomendasi yang masih belum selesai menindaklanjuti/masih dalam proses, dan 2 rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dilengkapi dengan data dukung yang telah sesuai
F	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Fransmigrasi dan Tenaga Kerja	76,95	ВВ	8	2	6	Seluruh rekomendasi telah disusun rencana tindak lanjut, terdapat 6 rekomendasi yang belum dapat ditindaklanjuti karena berkaitan dengan penyusunan laporan kinerja SKPD tahun 2024, dan 2 rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dilengkapi dengan data dukung yang telah sesuai
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	77,30	ВВ	5	1	4	Seluruh rekomendasi telah disusun rencana tindak lanjut, terdapat 2 rekomendasi yang belum dapat ditindaklanjuti karena berkaitan dengan penyusunan laporan kinerja SKPD tahun 2024, 1 rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dilengkapi dengan data dukung yang telah sesuai dan 2 rekomendasi yang masih belum selesai menindaklanjuti / masih dalam proses
25	Sekretariat DPRD	76,90	BB	6	2	4	Seluruh rekomendasi telah disusun rencana tindak lanjut, terdapat 3 rekomendasi yang belum dapat ditindaklanjuti karena berkaitan dengan penyusunan laporan kinerja SKPD tahun 2024, dan 2 rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dilengkapi dengan data dukung dan 1 rekomendasi masih dalam proses
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	73,65	ВВ	7	4	3	Sebagian rekomendasi telah disusun rencana tindak lanjut, terdapat 3 rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti, dan 4 rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dilengkapi dengan data dukung
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75,90	ВВ	6	3	3	Seluruh rekomendasi telah disusun rencana tindak lanjut, terdapat 3 rekomendasi yang belum dapat ditindaklanjuti karena berkaitan dengan penyusunan laporan kinerja SKPD tahun 2024, dan 3 rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dilengkapi dengan data dukung
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	75,15	BB	6	0	6	Seluruh rekomendasi masih belum disusun rencana tindak lanjut, targe waktu pelaksanaan tindak lanjut dan data dukungnya
29	Dinas Perhubungan	78,50	BB	2	0	2	Seluruh rekomendasi sudah disusu rencana tindak lanjut, target waktu pelaksanaan tindak lanjut namun untuk data dukungnya masih dalan proses
30	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	72,15	BB	12	0	12	Seluruh rekomendasi masih belum disusun baik rencana tindak lanjut, target waktu pelaksanaan tindak lanjut dan data dukungnya